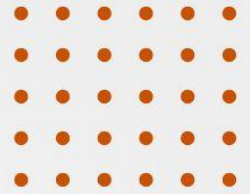




**PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**2026**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Isu – isu Strategis .....	2
1.3 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran.....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	14
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	14
<b>BAB II     PERENCANAAN STRATEGIS .....</b>	<b>17</b>
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD .....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	21
2.4 Perjanjian Kinerja .....	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	34
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>36</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2 Realisasi Anggaran .....	66
3.3 Inovasi 74	
3.4 Penghargaan .....	74
<b>BAB IV     PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Rekomendasi.....	75
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di DISDAGPERINAKER Berdasarkan Golongan Tahun 2025 .....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai DISDAGPERINAKER Berdasarkan Status Pendidikan Tahun 2025 .....	3
Tabel 1.3 Jumlah Sarana dan Prasarana DISDAGPERINAKER Tahun 2025 .....	4
Tabel 1.4 Jumlah Aset Tanah DISDAGPERINAKER Tahun 2025 .....	7
Tabel 1.5 Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja .....	9
Tabel 1.6 Dukungan Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 .....	9
Tabel 1.7 Tindak Lanjut atas Rekomendasi.....	14
Tabel 2.1 Sasaran Indikator dan Target Tahun 2024-2026.....	17
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	19
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	20
Tabel 2.4 Program dan kegiatan tahun 2025.....	21
Tabel 2.5 Tabel Perjanjian Kinerja Penetapan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 .....	24
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 .....	25
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	36
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Karanganyar Tahun 2025.....	37
Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	38
Tabel 3.4 Data Sentra IKM Kabupaten Karanganyar 2025 .....	41
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023- 2025.....	44
Tabel 3.6 Tabel Kemajuan Realisasi Sasaran Strategis .....	47
Tabel 3.7 Tabel Perbandingan Realisasi Daerah dengan Realisasi Provinsi .....	48
Tabel 3.8 Tabel Perbandingan Realisasi Daerah dengan Realisasi Nasional .....	48
Tabel 3.9 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2025.....	49

Tabel 3.10 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	53
Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	56

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 SOP Pengukuran Kinerja .....	15
Gambar 1. 2 SOP Pengumpulan Data Kinerja .....	15
Gambar 1. 3 SOP Pemantauan Kinerja.....	16
Gambar 3. 1 Realisasi Kinerja Utama Tahun 2025 .....	44
Gambar 3. 2 Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2023-2025 .....	46
Gambar 3. 3 Grafik Alokasi Anggaran Disdagperinaker 2025.....	54
Gambar 3. 4 Pelatihan Berbasis Kompetensi Design Grafis .....	63
Gambar 3. 5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Barista (Meracik Kopi) .....	64
Gambar 3. 6 Pemantauan Harga di Pasar terkait Pengendalian Inflasi .....	64
Gambar 3. 7 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelinting dan Blending Sigaret Kretek Tangan 2025 .....	65
Gambar 3. 8 Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.....	65

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada Masyarakat dan Pemerintah kabupayen Karanganyar, bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan Gambaran tentang Tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui Tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar melalui pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karanganyar, Februari 2026  
Plt. Kepala Dinas Perdagangan,  
Perindustrian, dan Tenaga Kerja

**Nugroho, S.Sos., M.Hum**  
Pembina Utama Muda / (IV c)  
NIP. 19680705 199001 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disdagperinaker adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga Kerja,
- b. Perumusan perencanaan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi pengendalian fasilitasi bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja,

- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas,
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas,
- g. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 Isu – isu Strategis

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja mempunyai aspek strategis sebagai berikut :

- a. Sebagai perangkat daerah yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga keterampilan dalam penyediaan akses dan mutu pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi,
- b. Menciptakan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja
- c. Peningkatan jaringan teknologi informasi dalam mendukung perkembangan produk dan informasi pemasaran secara digital,
- d. Sebagai perangkat daerah yang membina industri kecil dan menengah.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan, penyediaan tenaga kerja terampil, sarana dan prasarana peningkatan kapasitas tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja yang berkualitas.
- b. Belum optimalnya kepatuhan pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan.
- d. Belum optimalnya pengembangan sentra industri.

## 1.3 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

Sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar terdiri atas aparatur PNS maupun aparatur non PNS. Jumlah PNS di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebanyak 73 orang yang diklasifikasikan berdasar golongan.

Jumlah pegawai di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan masing-masing golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di DISDAGPERINAKEK Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

No	Golongan	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IV/e	-	-	-
2	IV/d	-	-	-
3	IV/c	1	-	1
4	IV/b	1	-	1
5	IV/a	3	2	5
6	III/d	8	4	12
7	III/c	2	3	5
8	III/b	5	6	11
9	III/a	10	7	17
10	II/d	4	5	9
11	II/c	7	1	8
12	II/b	1	-	1
13	II/a	1	-	1
14	I/d	2	-	2
15	I/c	-	-	-
16	I/b	-	-	-
17	I/a	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>73</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja beragam, mulai dari Sekolah Dasar hingga Strata S2. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DISDAGPERINAKEK Berdasarkan Status Pendidikan Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD	-	-	10	1	11
2	SMP Sederajat	5	1	34	-	40
3	SMA Sederajat	17	3	78	20	118
4	D3	2	3	14	9	28
5	S1	24	12	24	31	91
6	S2	4	2	-	-	6
7	S3	-	-	-	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>160</b>	<b>61</b>	<b>294</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

## Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar meliputi :

### a. Sarana Prasarana Pendukung

**Tabel 1. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana DISDAGPERINAKEK Tahun 2025**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	A.C. Split	Unit	28		28
2	A.C. Window	Unit	44		44
3	Alat Dapur lainnya	Unit	1		1
4	Alat Kantor Lainnya	Unit	5		5
5	Alat Kedokteran umum lainnya	Unit	1		1
6	Alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	1		1
7	Alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan lainnya (dst)	Unit	2		2
8	Alat pasca panen lainnya (dst)	Unit	1		1
9	Alat Pemadam/Portable	Unit	33		33
10	Alat pengangkat lainnya (dst)	Unit	7		7
11	Alat Penghancur Kertas	Unit	10		10
12	Alat Prosesing lainnya	Unit	138		138
13	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	342		342
14	Alat Tenis Meja	Unit	1		1
15	Alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Unit	2		2
16	Alat ukur/pembanding lainnya (dst)	Unit	233		233
17	Amplifier	Unit	5		5
18	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Unit		1	1
19	Bangku Injak	Unit	2		2
20	Bangku Tunggu	Unit	6		6
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	1		1
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	9		9
23	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	1		1
24	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Unit	2		2
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	3		3
26	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1		1
27	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Unit	1		1
28	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Unit	3		3
29	Brandkas	Unit	5		5
30	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	Unit	1		1
31	Camera Tune Simulator	Unit	1		1
32	Camera Video	Unit	4		4
33	Camera View Finder	Unit	1		1
34	Compressor Unit	Unit	1		1
35	Container	Unit	16		16
36	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1		1
37	Dispenser	Unit	3		3
38	Emergency Kit	Unit	2		2
39	Equalizer	Unit	1		1
40	Filing Cabinet Besi	Unit	63		63
41	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2		2

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Unit	29		29
43	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Unit	4		4
44	Gerobak Dorong	Unit	85		85
45	Gerobak Tarik	Unit	4		4
46	Gordyin/Kray	Unit	115		115
47	Handy Cam	Unit	2		2
48	Handy Talky (HT)	Unit	4		4
49	Intermediate Telephone/Key Telephone	Unit	4		4
50	Jam Mekanis	Unit	1		1
51	Kabel UTP	Unit	1		1
52	Karaoke	Unit	1		1
53	Kasur/Spring Bed	Unit	136		136
54	Kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Unit	1		1
55	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	Unit	20		20
56	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	Unit	1		1
57	Kipas Angin	Unit	21		21
58	Kursi Besi/Metal	Unit	852		852
59	Kursi Kayu	Unit	72		72
60	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Unit	5		5
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Unit	2		2
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2		2
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	3		3
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4		4
65	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Unit	2		2
66	Kursi Lipat	Unit	182		182
67	Kursi Putar	Unit	2		2
68	Kursi Tamu	Unit	14		14
69	Lap Top	Unit	33	1	34
70	Layar Film/Projector	Unit	5		5
71	Lemari Besi/Metal	Unit	59		59
72	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1		1
73	Lemari Es	Unit	8		8
74	Lemari Kaca	Unit	13		13
75	Lemari Kayu	Unit	42		42
76	Lensa Kamera	Unit	1		1
77	Local Area Network (LAN)	Unit	1		1
78	Loudspeaker	Unit	15		15
79	Megaphone	Unit	7		7
80	Meja 1/2 Biro	Unit	65		65
81	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	41		41
82	Meja Kerja Kayu	Unit	123		123
83	Meja Komputer	Unit	15		15
84	Meja Panjang	Unit	15		15
85	Meja Podium	Unit	2		2
86	Meja Rapat	Unit	72		72
87	Meja Resepsionis	Unit	2		2
88	Meja Tambahan	Unit	10		10
89	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	Unit	2		2
90	Mesin Absensi	Unit	1		1
91	Mesin Bor Kayu	Unit	1		1
92	Mesin Bubut	Unit	1		1

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
93	Mesin Gergaji	Unit	1		1
94	Mesin Gergaji Logam	Unit	2		2
95	Mesin Jahit	Unit	2		2
96	Mesin Jahit Terpal	Unit	32		32
97	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	Unit	2		2
98	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Unit	32		32
99	Mesin Kompresor	Unit	1		1
100	Mesin Las Listrik	Unit	3		3
101	Mesin Pembuat Es	Unit	22		22
102	Mesin Pemotong Plat	Unit	2		2
103	Mesin Pemotong Rumput	Unit	2		2
104	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	5		5
105	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2		2
106	Meubeleur lainnya	Unit	23		23
107	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	Unit	2		2
108	Microphone	Unit	1		1
109	Microphone/Wireless MIC	Unit	4		4
110	Microwave Oven	Unit	1		1
111	Mimbar/Podium	Unit	1		1
112	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	1		1
113	Mini Komputer	Unit	4		4
114	Modem	Unit	17		17
115	Monitor	Unit	4		4
116	Note Book	Unit	36	2	38
117	Oven Listrik	Unit	2		2
118	Overhead Projector	Unit	1		1
119	P.C Unit	Unit	36		36
120	Panel Pameran	Unit	2		2
121	Papan Nama Instansi	Unit	2		2
122	Papan Tulis	Unit	18		18
123	Papan Visual/Papan Nama	Unit	4		4
124	Peralatan Komputer lainnya	Unit	1		1
125	peralatan las lainnya (dst)	Unit	1		1
126	Peralatan Las Karbit	Unit	2		2
127	Peralatan Personal Komputer lainnya	Unit	3		3
128	peralatan studio audio lainnya (dst)	Unit	1		1
129	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	Unit	18		18
130	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	Unit	2		2
131	perkakas bengkel service lainnya (dst)	Unit	2		2
132	perkakas pengangkat bermesin lainnya (dst)	Unit	2		2
133	Peta	Unit	2		2
134	Pick Up	Unit	2	1	3
135	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Unit	2		2
136	Portable Generating Set	Unit	2		2
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	61		61
138	Rak Besi	Unit	15		15
139	Rak Kayu	Unit	9		9
140	Rice Cooker (Alat Dapur)	Unit	2		2
141	Rice Warmer	Unit	1		1
142	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	Unit	1		1
143	Sangkur	Unit	1		1

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
144	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	7		7
145	Sepeda Motor	Unit	66		66
146	Sice	Unit	3		3
147	Slide Projector	Unit	3		3
148	Sofa	Unit	3		3
149	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)	Unit	1		1
150	Sound System	Unit	25		25
151	Stabilisator	Unit	2		2
152	Station Wagon	Unit	8		8
153	Steam Cleaner	Unit	4		4
154	Tablet PC	Unit	2		2
155	Tabung Gas	Unit	5		5
156	Tangga Aluminium	Unit	2		2
157	Tas Kamera	Unit	1		1
158	Telephone (PABX)	Unit	2		2
159	Telephone Mobile	Unit	1		1
160	Televisi	Unit	11		11
161	Telex	Unit	3		3
162	Tempat Tidur Besi	Unit	60		60
163	Tenda	Unit	9		9
164	Timbangan Barang	Unit	1		1
165	Tripod Camera	Unit	1		1
166	Truck + Attachment	Unit	1		1
167	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	3		3
168	Unit Pemancar MF/MW Portable	Unit	1		1
169	Unit Power Supply	Unit	1		1
170	Unit Tranceiver VHF Transportable	Unit	1		1
171	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1		1
172	White Board	Unit	18		18

b. Aset Tanah

Aset tanah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 4 Jumlah Aset Tanah DISDAGPERINAKEK Tahun 2025**

No	Aset Tanah	Luas Tanah (m2)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	1	Dagen, Jaten
2	Tanah Bangunan Pasar	2,601	Dagen, Jaten
3	Tanah Bangunan Pasar	1,92	Ngringo, Jaten
4	Tanah Kaveling (dst)	10	Brujul, Jaten
5	Tanah Bangunan Pasar	7,44	Tawangmangu, Tawangmangu
6	Tanah Bangunan Pasar	817	Tawangmangu, Tawangmangu
7	Tanah Bangunan Terminal Darat	4,538	Tawangmangu, Tawangmangu
8	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	1,148	Beji, Tawangmangu
9	Tanah Bangunan Pasar	880	Karangpandan

No	Aset Tanah	Luas Tanah (m2)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Tanah Bangunan Pasar	15,415	Karangpandan
11	Tanah Bangunan Pasar	2,5	Karangpandan
12	Tanah Bangunan Pasar	10,093	Karangpandan
13	Tanah Bangunan Pasar	1,911	Karangpandan
14	Tanah Bangunan Pasar	14,759	Karangpandan
15	Tanah Bangunan Pasar	880	Dukuh, Karangpandan
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3,546	Bangsri, Karangpandan
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,533	Bangsri, Karangpandan
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,091	Bangsri, Karangpandan
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	13,614	Bangsri, Karangpandan
20	Tanah Bangunan Pasar	11,768	Tuban, Gondangrejo
21	Tanah Bangunan Pasar	8,503	Matesih, Matesih
22	Tanah Bangunan Pasar	2,16	Moyoretno, Matesih, Matesih
23	Tanah Bangunan Pasar	2,253	Ngadiluwih, Matesih
24	Tanah Bangunan Pasar	11,449	Ngijo, Tasikmadu
25	Tanah Bangunan Pasar	5,899	Kwadungan, Kerjo
26	Tanah Bangunan Pasar	3,5	Kwadungan, Kerjo
27	Tanah Bangunan Pasar	3,687	Sumberejo, Kerjo
28	Tanah Bangunan Pasar	880	Kuto, Kerjo
29	Tanah Bangunan Pasar	3,2	Mojogedang, Mojogedang
30	Tanah Bangunan Pasar	4,83	Pereng, Mojogedang
31	Tanah Bangunan Pasar	4,851	Colomadu
32	Tanah Bangunan Pasar	4,725	Kemiri, Kebakkramat
33	Tanah Bangunan Pasar	960	Kaliwuluh, Kebakkramat
34	Tanah Bangunan Pasar	15,6	Jumapolo, Jumapolo
35	Tanah Bangunan Pasar	4,217	Jumapolo, Jumapolo
36	Tanah Bangunan Pasar	1,722	Kwangsan, Jumapolo
37	Tanah Bangunan Pasar	3,235	Lemahbang, Jumapolo
38	Tanah Bangunan Pasar	7,268	Jatipuro
39	Tanah Bangunan Pasar	4,35	Jatipuro
40	Tanah Bangunan Pasar	2	Jatipuro
41	Tanah Bangunan Pasar	1,57	Jatipuro
42	Tanah Bangunan Pasar	3,017	Ngargoyoso
43	Tanah Bangunan Pasar	5,113	Jatiyoso
44	Tanah Bangunan Pasar	6,588	Tlobo, Jatiyoso
45	Tanah Bangunan Pasar	15,544	Tegalgede, Karanganyar
46	Tanah Bangunan Pasar	1,718	Tegalgede, Karanganyar
47	Tanah Bangunan Pasar	1,466	Lalung, Karanganyar
48	Tanah Bangunan Pasar	8,942	Jungke, Karanganyar
49	Tanah Bangunan Pasar	-	Bolong, Karanganyar
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	796	Jalan Kertapati No.1, Cangakan, Karanganyar
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jalan KH. Samanhudi No.5, Cangakan
52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Cangakan, Karanganyar
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Cangakan, Karanganyar
54	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Komplek Kantor Cangakan
55	Tanah Hutan Wisata	3,096	Selatan Bank Daerah, Lumbang Sari RT. 01/14, Cangakan
56	Tanah Lapangan Lainnya	2,3	Perum KORPRI, Popongan, Karanganyar

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

**Tabel 1. 5 Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja**

Kode Rekening			Uraian	Anggaran
<b>4</b>	<b>1</b>		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp 3.952.030.000,00</b>
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp 3.952.030.000,00
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp 18.817.424.672,00</b>
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp 9.422.284.222,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.395.140.450,00
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp 2.300.050.000,00</b>
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 447.050.000,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.853.000.000,00

Secara terperinci, anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2025 tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 1. 6 Dukungan Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025**

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>44.704.950</b>
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	44.704.950
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>1.972.420.000</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.862.445.000
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100.000.000
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	9.975.000
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>8.500.000</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8.500.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.356.000</b>
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	5.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	13.356.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	7.997.400
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>142.374.750</b>
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	29.999.850
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	112.374.900
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.720.000</b>
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	32.720.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27.600.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.600.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.422.284.222</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.422.284.222
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.023.300</b>
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	10.882.100
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1.141.200
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>484.936.700</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	350.486.700
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134.450.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>561.152.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.127.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.744.600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	335.759.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	113.526.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.970.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.025.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.998.838.100</b>
	Pengadaan Mebel	116.200.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.930.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.696.908.100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.800.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>921.202.550</b>
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	420.398.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	500.804.550
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.716.000</b>
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2.716.000
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>15.474.800</b>
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.474.800
	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.716.000</b>

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.716.000
<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>16.776.000</b>
	Pengawasan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	16.776.000
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Pelaksanaan Peromosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>185.010.000</b>
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	185.010.000
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>514.037.800</b>
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	37.010.750
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	37.668.800
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8.291.700
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	422.311.800
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>30.084.200</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	28.275.400
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1.808.800

<b>Program</b>	<b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>39.375.000</b>
	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	34.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5.375.000
		<b>21.117.474.672</b>

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja ini tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Isu – isu Strategis

1.3 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

**BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

2.4 Perjanjian Kinerja

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

#### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

#### LAMPIRAN

### 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga kerja ini telah dievaluasi oleh APIP. Adapun saran/ rekomendasi dan tindak lanjut tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 1. 7 Tindak Lanjut atas Rekomendasi**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Memastikan target kinerja tahunan berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan sekali atas rencana aksi.
2.	Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP Pengukuran capaian kinerja dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi. Dalam SOP dimaksud agar memasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang	Menetapkan SOP Pengumpulan Data, SOP Pemantauan Kinerja, SOP Pengukuran Kinerja
3	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.	Akan mengajukan permintaan revidi untuk laporan kinerja tahunan 2025 pada Inspektorat Daerah

### 1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

1. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b> DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">Sub Bagian Keuangan</p>	NOMOR SOP	800 / 2495.7.1 / VII / 2025
	TGL. PEMBUATAN	21 Juli 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar <b>HERU JOKO SULISTYONO, S.STP., M.Si.</b> 19800314 199912 1 001
NAMA SOP	Pengukuran Kinerja	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).	1. Kepemimpinan yang baik. 2. Kemampuan analisis yang baik. 3. Kemampuan pengambilan keputusan yang baik. 4. Kemampuan komunikasi yang baik. 5. Mempunyai pengetahuan bidang pemerintahan. 6. Mempunyai pengetahuan administrasi kepegawaian dan keuangan. 7. Kemampuan bekerja sama yang baik. 8. Mengetahui peraturan perundangan-undangan.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Pemantauan kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Capaian Kinerja	1. Komputer      3. ATK 2. Printer        4. Kalkulator	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengukuran Kinerja tidak berjalan dengan baik.	1. Buku Pencatatan	

Gambar 1. 1 SOP Pengukuran Kinerja

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b> DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">Sub Bagian Keuangan</p>	NOMOR SOP	800 / 2496.7.1 / VII / 2025
	TGL. PEMBUATAN	21 Juli 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar <b>HERU JOKO SULISTYONO, S.STP., M.Si.</b> 19800314 199912 1 001
NAMA SOP	Pengumpulan Data Kinerja	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).	1. Kepemimpinan yang baik. 2. Kemampuan analisis yang baik. 3. Kemampuan pengambilan keputusan yang baik. 4. Kemampuan komunikasi yang baik. 5. Mempunyai pengetahuan bidang pemerintahan. 6. Mempunyai pengetahuan administrasi kepegawaian dan keuangan. 7. Kemampuan bekerja sama yang baik. 8. Mengetahui peraturan perundangan-undangan.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Capaian Kinerja	1. Komputer      3. ATK 2. Printer        4. Kalkulator	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pemantauan Kinerja tidak berjalan dengan baik.	1. Buku Pencatatan	

Gambar 1. 2 SOP Pengumpulan Data Kinerja

- Menyusun pedoman pemantauan mengenai perkembangan atau kemajuan pencapaian kinerja OPD

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b> DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">Sub Bagian Keuangan</p>	NOMOR SOP	800 / 2454.3.1 / 001 / 2025
	TGL. PEMBUATAN	21 Juli 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 <b>HERU JORO SULISTYONO, S.STP., M.Si.</b> 19800314 199912 1 001
NAMA SOP	Pemantauan Kinerja	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).	1. Kepemimpinan yang baik. 2. Kemampuan analisis yang baik. 3. Kemampuan pengambilan keputusan yang baik. 4. Kemampuan komunikasi yang baik. 5. Mempunyai pengetahuan bidang pemerintahan. 6. Mempunyai pengetahuan administrasi kepegawainan dan keuangan. 7. Kemampuan bekerja sama yang baik. 8. Mengetahui peraturan perundangan-undangan.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SCP Pengukuran Kinerja 2. SCP Pengumpulan Data Capaian Kinerja	1. Komputer                    3. ATK 2. Printer                      4. Kalkulator	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pemantauan Kinerja tidak berjalan dengan baik.	1. Buku Pencatatan	

**Gambar 1. 3 SOP Pemantauan Kinerja**

- Memberikan edukasi kepada setiap pegawai untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang ditetapkan dan tindak lanjut yang dilakukan.

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS

#### 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada.

Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Rencana strategis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026. Di dalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.

**Tabel 2. 1 Sasaran Indikator dan Target Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		
			2024	2025	2026
Tujuan		Indeks	77.20	77.40	77.68

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan		Pembangunan Manusia (IPM)			
	Sasaran Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.1	71.3	71.6
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.60	5.55	5.5
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Pertumbuhan ekonomi	4.7		
	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	5	7	7
	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam	Jumlah sentra industri kecil	8	11	14
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	65	67	70
	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	71.25	71.50	71.55

Sumber : Disdagperinaker, 2025

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran Disdagperinaker Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotong royongan		Indeks Pembangunan Manusia	skor	78.19
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74.6
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.41
Meningkatkan perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Pertumbuhan ekonomi	%	6.15
	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	unit	7
	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industry yang dibentuk	sentra	11
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	skor	86
	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	skor	73

Sumber : Rencana Strategis Disdagperinaker 2024-2026

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotong royongan		Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja	Meningkatkan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatkan pelayanan antar kerja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
Meningkatkan perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pengembangan sektor perdagangan	Pemantapan kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan
	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	Mengoptimalkan ketersediaan SDM dan peralatan standart kemetrologian	
	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industry yang dibentuk	Menciptakan sentra industri mikro	Pengembangan sektor industri mikro untuk memperkuat basis industri yang tangguh
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan sumber daya kelembagaan untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan kinerja sumber daya kelembagaan yang berorientasi pelayanan yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborasi
	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD		

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2025 tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 2. 4 Program dan kegiatan tahun 2025**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
	Perluasan Kesempatan Kerja
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
	Pengolahan Data Retribusi Daerah
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>

<b>Program</b>	<b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>BARANG PENTING</b>	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>
	Pengawasan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Pelaksanaan Peromosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
	berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penegasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja juga sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 5 Tabel Perjanjian Kinerja Penetapan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran Srategis	Indikator Kerja	Tahun 2025
			Target
1	2	3	4
1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.40
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Daerah	71.3

No	Tujuan/Sasaran Srategis	Indikator Kerja	Tahun 2025
			Target
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.5
3	Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	6.15
4	Sasaran 2 : Meningkatkan produktivitas perdagangan	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	7 unit
	Sasaran 3 : Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	11 sentra
5	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	73
6	Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	71.55

Sumber : Disdagperinaker, 2025

**Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran Srategis	Indikator Kerja	Tahun 2025
			Target
1	2	3	4
1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.19
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Daerah	74.6
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.41
3	Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	6.15
4	Sasaran 2 : Meningkatkan produktivitas perdagangan	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	7 unit
	Sasaran 3 : Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	11 sentra
5	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86

6	Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	73
---	---	-----------------	----

Sumber : Disdagperinaker, 2025

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja akan diwujudkan dalam program dan kegiatan di tahun 2025 sebagaimana berikut:

**Tabel 2. 7 Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			44.704.950
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1	44.704.950
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1.972.420.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	170	1.862.445.000
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1	100.000.000
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pelatihan kerja Kabupaten/ Kota	10	9.975.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			8.500.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1	8.500.000
PROGRAM	Pelayanan antar Kerja di			18.356.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
<b>PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terlaksananya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1	5.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	1	13.356.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12	7.997.400
	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja	1	34.800.000
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			142.374.750
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Indust	1	29.999.850
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur	1	112.374.900
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			32.720.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1	32.720.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.600.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	27.600.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.422.284.222
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	9.422.284.222
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			12.023.300
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data obyek, subyek dan wajib retribusi daerah	12	10.882.100
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data	12	1.141.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			484.936.700
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	652	134.450.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2	350.486.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	17.127.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2	7.025.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	57.744.600

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	335.759.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	113.526.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	29.970.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah sarana penataan arsip		7.025.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.998.838.100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	116.200.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	140.930.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	1.696.908.100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	44.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	343.350.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	3.769.701.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas	12	222.722.100

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jabaran yang dipelihara dan dibayarkan pajak		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7	32.739.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	227.862.200
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			921.202.550
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17	420.398.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17	500.804.550
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17	25.000.000
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.716.000
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<b>17</b>	2.716.000
	Pengendalian Harga, dan			

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemantauan harga	17	15.474.800
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokassi pengawasan pupuk		2.716.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	17	2.716.000
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			16.776.000
	Pengawasan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	659	16.776.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Peromosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			185.010.000
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1	185.010.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			514.037.800
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3	37.010.750

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	3	37.668.800
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	8.754.750
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	8.291.700
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	422.311.800
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			30.084.200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri	5	28.275.400

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Menengah yang berlokasi di satu Kab /Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah pemenuhan verifikasi dalam rangka penerbitan perizinan	1	1.808.800
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			39.375.000
	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs)	4	34.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan	2	5.375.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		
				21.117.474.672

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disdagperinaker, 2025

Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan. Selain itu dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan.

Demikian juga pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar. Pada Tahun anggaran 2025 juga terdapat perubahan anggaran sehingga memerlukan adanya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja memiliki instrument yang mendukung penerapan SAKIP, berupa aplikasi yang digunakan di lingkup pemerintah daerah, yaitu :

1. Aplikasi SIINas. ( [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id) )  
SIINAs merupakan singkatan dari Sistem Informasi Industri Nasional. SIINas adalah platform digital terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi industri nasional, dengan fokus utama pada sektor IKM.
2. Aplikasi Ayo Kerjo ( [bursakerja.jatengprov.go.id](http://bursakerja.jatengprov.go.id) )  
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berisi informasi seputar lowongan kerja secara *online* yang bisa diakses selama 24 jam. Pada aplikasi "Ayo Kerjo" bisa dilihat jenis lowongan kerja, daerah mana, jabatan yang dibutuhkan, syarat-syarat, cara melamar, dan lainnya.
3. Aplikasi siskop2mi ( [siskop2mi.bp2mi.go.id](http://siskop2mi.bp2mi.go.id) )

SISKOP2MI merupakan akun yang digunakan untuk mencari peluang sekaligus mendaftar pekerjaan di luar negeri. Dari akun ini juga calon pekerja migran mengunggah dokumen persyaratan, menerima surat lamaran, dan memantau tahapan yang akan dilalui.

4. Aplikasi metrologi ([metrology.kemendag.go.id](http://metrology.kemendag.go.id))

Aplikasi ini mengintegrasikan pengendalian metrologi legal yang meliputi persetujuan tipe, tera/tera ulang, dan pengawasan.

5. Aplikasi Sistem Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga ([simpktn.kemendag.go.id](http://simpktn.kemendag.go.id))

Pada aplikasi ini terdapat layanan perijinan dan non perijinan. Layanan Perijinan antara lain standardisasi dan pengendalian mutu, pemberdayaan konsumen. Layanan Non perijinan antara lain layanan pengujian, layanan kalibrasi, sertifikasi produk dan sertifikasi personal

6. Aplikasi SODAGAR ([sodagarkab.go.id](http://sodagarkab.go.id))

Aplikasi ini memberikan informasi tentang harga bahan pokok dan barang penting di Kabupaten Karanganyar, informasi data ekspor dan layanan perijinan daftar usaha.

7. OSS

OSS singkatan dari Online Single Submission yang merupakan system perijinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia. OSS mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh ijin dari berbagai tingkatan dan sektor melalui satu platform digital. Tujuan dari OSS Adalah untuk mengurangi waktu dan birokrasi dalam proses perijinan berusaha

8. Aplikasi *Smart* SAKIP

Merupakan aplikasi yang berisi capaian kinerja anggaran dan kegiatan di perangkat daerah.

9. SIPD

Merupakan aplikasi terkait penganggaran, penatausahaan keuangan yang terintegrasi.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kinerja tahun ke-2 dan terakhir pada periode Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 103,21% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruhtujuan dan sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja tujuan dan sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome berdasarkan PermenPAN RB No 22 Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan Analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100%	Istimewa
2	➤ 85 - 100%	Baik
3	➤ 60 - 85%	Butuh Perbaikan
4	➤ 20 - 60%	Kurang
5	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Berikut uraian capaian kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

**Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Karanganyar Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target akhir RPMJD
			Target	Realisasi	Persentase	
1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.19	78.67	100.61	77.68
2	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74.6	74.81	100.28	76
3		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.41	3.26	104.60	3.1
4	Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	66.15	5.75	93.50	6.20
5	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	7 unit	7 unit	100	7
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	11 sentra	14 sentra	127.27	14
7	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85.58	99.52	75
8	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	73	72.95	99.93	71.75
Rata-rata capaian					103,21	

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Tahun 2025, terdapat 4 (empat) indikator yang melebihi 100% atau kategori Istimewa, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah sentra industri kecil yang dibentuk. Terdapat 1 (satu) indikator yang tepat mencapai 100% yaitu jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan. Terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target, atau di bawah 100% yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sakip OPD

### 1. Membandingkan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Persentase		
1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.19	78.67	100.61	istimewa	BPS
2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74.6	74.81%	100.26	Istimews	BPS
3		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.41	3.26	104.60	Istimews	BPS
4	Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	6.15	5.75	93.50	baik	BPS
5	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	7 unit	7 unit	100 %	Baik	Disdagperinaker
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	11 sentra	14 sentra	127.27	Istimewa	Disdagperinaker

7	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85.58	99.52	Baik	BPS
8	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	73	72.95	99.93	Baik	Inspektorat

Tenaga kerja yang produktif dan kompetitif merupakan hal penting dalam pembangunan suatu daerah, karena tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang menggerakkan perekonomian. Tenaga kerja yang kompeten akan mampu bekerja dengan baik dan mempunyai produktivitas kerja yang baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karanganyar senilai 78.67 %. Angka ini menunjukkan kualitas Pembangunan sumber daya manusia di Karanganyar cukup tinggi. Indeks Pembangunan Manusia didukung oleh dimensi Pendidikan dan Kesehatan. Dimensi Pendidikan meliputi Rata Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimensi Kesehatan meliputi Angka Harapan Hidup. Target dari indeks Pembangunan Manusia adalah 78.19. Sehingga Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia di angka 100.26% atau kategori Istimewa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2025 terdapat Pengangguran Terbuka sejumlah 18.710 orang, Angkatan kerja sejumlah 573.450 orang dan bukan Angkatan kerja 193.070 orang. Angkatan kerja yang bekerja sejumlah 554.740 orang. Total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja adalah 766.520 orang. Capaian Kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2025 termasuk dalam kategori Istimewa yaitu 100.28 %. Tingkat partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPAK sebesar 74.81 %, sedangkan target realisasi TPAK adalah 74.6. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Jadi makin tinggi nilai Angkatan kerja makin banyak pula penduduk yang produktif bekerja menghasilkan barang dan jasa.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Karanganyar sebesar 3.26. Artinya dari 100 (seratus) orang Angkatan kerja terdapat 3 (tiga) orang yang sama sekali tidak

memiliki pekerjaan. Target yang diharapkan dari Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Adalah 3.41. Sehingga capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di angka 104.60% yaitu kategori Istimewa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar berada di angka 5.75. Target Pertumbuhan ekonomi sebesar 6.15, sehingga capaian kinerja Pertumbuhan ekonomi sebesar 93.50% atau kategori baik. Pertumbuhan Ekonomi yang baik di Karanganyar ini didukung oleh banyak faktor. Antara lain meningkatnya investasi, meningkatnya produktivitas barang jasa di sektor usaha formal maupun informal, dan adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Sektor perdagangan juga merupakan penopang perekonomian di Kabupaten Karanganyar. Perdagangan di Kabupaten Karanganyar didukung sarana prasarana perdagangan berupa pasar rakyat dan toko modern. Terdapat (17) tujuh belas pasar rakyat dan 88 (delapan puluh delapan) toko modern. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor perdagangan yang berdaya saing melalui peningkatan jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan.

Pada tahun 2025 Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mempunyai target (tujuh) 7 unit produk lokal yang berpotensi unggulan. Realisasi sejumlah (tujuh) 7 unit, sehingga capaian kinerja adalah tepat 100% atau Baik.

Produk lokal yang berpotensi unggul merupakan produk rintisan untuk menuju Produk Unggulan Daerah sesuai dengan makna Produk Unggulan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014. Produk Unggulan merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Di Kabupaten Karanganyar banyak terdapat produk lokal yang mulai dikembangkan, dari produk kuliner hingga kerajinan. Produk kuliner pun berbahan

baku lokal yaitu singkong maupun ubi. Produk lokal yang berpotensi unggul di kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Keripik Ubi
- b. Roti Singkong
- c. Gethuk
- d. Kerajinan Bambu
- e. Batik Girilayu
- f. Teh
- g. Kopi

Produk lokal ini yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar untuk terus dikembangkan dan menjadi produk identitas Kabupaten Karanganyar.

Pengembangan produk lokal merupakan produk Industri Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar berkomitmen memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri serta memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat melalui pengembangan industri kecil di sentra IKM .

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, menetapkan target pembentukan sentra IKM sebanyak 11 (sebelas) sentra. Pada tahun 2025 ini jumlah realisasi sentra industri kecil yang dibentuk adalah 14 sentra. Capaian kinerja senilai 127.27% atau termasuk kategori Istimewa.. Adapun Sentra Industri Kecil yang ada di Kabupaten Karanganyar tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3. 4 Data Sentra IKM Kabupaten Karanganyar 2025**

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	Sentra Industri Batik Tulis	Girilayu, Matesih	Tekstil
2	Sentra Industri Genteng	Sroyo, Jaten	Genteng
3	Sentra Industri Genteng	Brujul, Jaten	Genteng
4	Sentra Industri Batu Bata	Jetis, Kebakkramat	Batu Bata
5	Sentra Industri Batu Bata	Jati, Kebakkramat	Batu Bata
6	Sentra Industri Tempe	Sringin, Jumantono	Tempe
7	Sentra Industri Arang	Bakalan, Jumapolo	Arang
8	Sentra Industri Pakaian Jadi	Sukosari, Jumantono	Pakaian Jadi
9	Sentra Industri Pengolahan Ubi	Karanglo, Tawangmangu	Keripik Ubi

10	Sentra Industri Kerupuk Kulit	Sringin, Jumantono	Kerupuk Kulit
11	Sentra Industri Anyaman Bambu	Kebak, Jumantono	Anyaman Bambu
13	Sentra Industri Mebel	Genengan, Jumantono	Mebel
14	Sentra Industri Mebel	Jatisono, Jatiputo	Mebel

Sumber : *Disdagperinaker 2025*

Upaya pengembangan Sentra Industri Kecil akan terus dikembangkan dengan cara :

- a. Membangun kesadaran masyarakat mengenai potensi ekonomi dari kekayaan daerah yang dimiliki;
- b. Mengembangkan motivasi, kreativitas dan inovasi masyarakat lokal untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang bercirikan kearifan lokal; dan
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dalam membangun ekonomi daerah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan Masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator komposit yang dirancang untuk mengukur keberhasilan program reformasi birokrasi pada satuan organisasi pemerintahan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi terukur tentang pencapaian perubahan yang berkaitan dengan struktur organisasi, mekanisme kerja, kapabilitas aparatur, dan kualitas layanan publik. Indeks berfungsi sebagai barometer yang membantu membandingkan kinerja antar unit, memantau tren perkembangan dari waktu ke waktu, dan memprioritaskan area intervensi yang membutuhkan perbaikan. Indeks Reformasi Birokrasi di Karanganyar ditargetkan sebesar 86, sedangkan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2025 adalah sebesar 85.58, sehingga capaian kinerja Indeks reformasi Birokrasi sebesar 99,52% atau kategori baik,

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik good governance dan asas umum dalam penyelenggaraan negara. Penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas yang terintegrasi dalam setiap program/kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja. SAKIP merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang

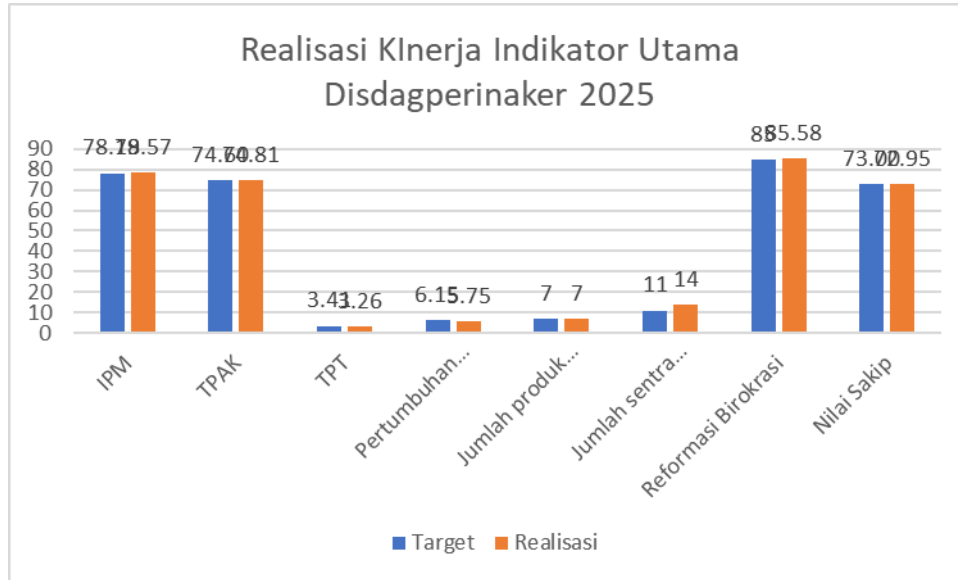
berorientasi pada hasil (result oriented government). Implementasi SAKIP merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan good governance dan sistem manajemen pemerintah yang baik.

Akuntabilitas dalam lingkungan birokrasi pemerintah merupakan implementasi atas kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi. Instrumen akuntabilitas terdiri dari instrumen dasar dan instrumen pendukung. Instrumen dasar berupa peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan komitmen politik dan mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukung terdiri dari pedoman tingkah laku, sistem monitoring kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah. Indikator Akuntabilitas pemerintahan dapat diukur melalui Nilai Sakip Perangkat daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi Sakip di perangkat daerah dievaluasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan. Pelaksanaan kinerja diawali dari penerapan pohon kinerja dan cascading. Penerapan cascading memungkinkan pencapaian output dan outcome dapat tercapai. Pada tahun 2025, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar menetapkan target Nilai Sakip sebesar 73 atau baik realisasi nilai Sakip sebesar 72.95, sehingga capaian kinerja sebesar 99.93 atau baik

.Berdasarkan penilaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kualitas rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) agar jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, memperbaiki target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sehingga dapat dicapai, menantang, realistis serta agar setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.

Gambaran capaian indikator kinerja utama Dinas Perdagangan perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tertera pada grafik berikut.



**Gambar 3. 1 Realisasi Kinerja Utama Tahun 2025**

**2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 - 2025**

Target kinerja utama pada perangkat daerah direncanakan selalu naik, dengan tolok ukur adanya peningkatan kualitas hasil kinerja. Pemantauan perkembangan capaian target dalam tiga tahun terakhir didasarkan dengan ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023 dan RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026

Hasil realisasi indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2023 – 2025 tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023- 2025**

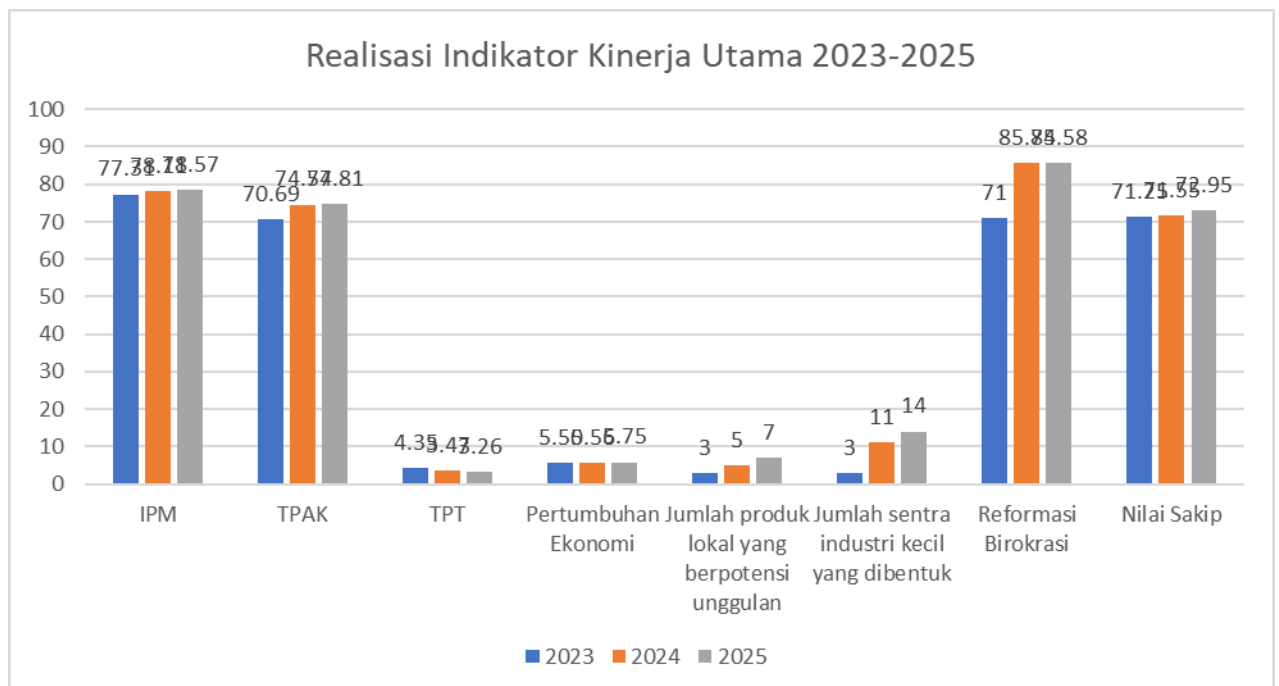
No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		77.31			78.11		78.19	78.67	100.61

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan										
2	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.51	70.69	94.87	71.10	74.57	104.88	74.6	74.81%	100.28%
3		Tingkat Pengangguran Terbuka	2.31	4.35		5.60	3.47		3.41	3.26	104.60
	Tujuan 2 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi		5.50			5.56		6.15	5.75	93.50
4	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan		3		5	5	100	7	7	100%
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk		3		3	3	100	11	14	127.27
6	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang	Indeks Reformasi Birokrasi		70.91			85.74		86	85.58	99.51

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi										
7	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	71.26	71.25	99.9	71.55	71.5	100	73	72.95	99.93%

Realisasi indikator kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 hingga tahun 2025 mengalami dinamika perubahan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 hingga tahun 2025 cenderung mengalami peningkatan. Tingkat Pengangguran juga menurun dalam tiga tahun terakhir Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan dari tahun 2024 meningkat di tahun 2025. Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Demikian juga pada indikator nilai Sakip, mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025.

Perkembangan realisasi indikator kinerja utama tahun 2023- 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 2 Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2023-2025

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Akhir RPJMD

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Pada tahun 2025 diperhitungkan indikator kinerja dapat mencapai target yang direncanakan. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 terhadap akhir tahun Rencana Pembangunan Daerah tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3. 6 Tabel Kemajuan Realisasi Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.67	77.68	101.27
2	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.81	71.6	104.48
3		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.26	5.50	168.71
4	Tujuan 2 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5.75	6.20	92.74
5	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	7 unit	7 unit	100
6	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	14 sentra	14 sentra	100
7	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	75	114.11
8	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	72.95	71.75	101.67

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2025 sebesar 74.81 melebihi dari target 2026 sebesar 71.6. Sehingga pencapaian sebesar 104.48%. Realisasi Tahun 2025 telah melebihi target akhir RPJMD. Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan pada tahun 2025 adalah 7 unit. sedangkan target pada tahun 2026 adalah 7 unit, sehingga capaian 100%. Realisasi tahun 2025 telah senilai

dengan target akhir tahun RPJMD. Jumlah sentra industri kecil pada tahun 2025 mencapai 14 sentra, hal ini sama dengan target di akhir tahun RPJMD tahun 2026 yaitu 14 sentra, sehingga capaian sebesar 100%. Nilai SAKIP pada tahun 2025 sebesar 72.95, sedangkan target nilai SAKIP di akhir tahun RPJMD adalah 71.75. Artinya capaian nilai SAKIP telah melebihi target yaitu sebesar 101.67%.

#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional

Realisasi kinerja utama kabupaten perlu dibandingkan dengan capaian provinsi, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kinerja kabupaten dengan provinsi. Perbandingan realisasi kinerja kabupaten dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Realisasi Daerah dengan Realisasi Provinsi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten	Jawa Tengah	% Capaian
1	Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.67	74.77	105.21
2	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.81	74.36	100.60
3		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.26	4.76	146.01

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi di Jawa Tengah, dengan capaian 100.60%.

**Tabel 3. 8 Tabel Perbandingan Realisasi Daerah dengan Realisasi Nasional**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten	Nasional	% Capaian
1	Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.67	75.90	103.65

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten	Nasional	% Capaian
	kegotongroyongan				
2	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.81	70.59	105.97
3		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.26	4.76	146.01

Realisasi Indek Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karanganyar tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi Nasional. Artinya Pembangunan di Kabupaten Karanganyar dari sisi sumber daya manusia telah berjalan dengan baik

#### 5. Analisis Keberhasilan Kegagalan dan Solusi 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, dapat terjadi permasalahan atau kendala yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan sehingga memungkinkan tidak tercapainya target sesuai yang ditetapkan. Identifikasi keberhasilan maupun kegagalan tertera pada tabel berikut.

**Tabel 3. 9 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
	Tujuan 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.19	78.67	100.61	Meningkatnya Rata Lama Sekolah Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Meningkatnya Angka Harapan Hidup	
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.6	74.81	100.28	Kategori Baik Penyebab : Perangkat daerah aktif memberikan informasi lowongan kerja, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan fasilitasi untuk penempatan tenaga kerja  Meningkatkan kualitas

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
						dariduniusaha dunia industri, meningkatkan kualitas kurikulum Lembaga pelatihan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan berbasis kompetensi, melaksanakan pendampingan untuk menumbuhkan minat kerja di usia muda. Perangkat daerah aktif memberikan informasi lowongan kerja, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha dunia industri, meningkatkan kualitas kurikulum Lembaga pelatihan.	pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan fasilitasi untuk penempatan tenaga kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.41	3.26	104.60	Kategori Baik Penyebab Meluasnya kesempatan kerja, partisipasi penduduk dalam bekerja meningkat baik sektor formal maupun informal	
	Tujuan 2 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi	Pertumbuhan Ekonomi	6.15	5.75	93.50	Kategori baik. Penyebab Munculnya IKM baru	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
	ekonomi lokal						
2	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah Produk lokal yang berpotensi unggulan	7 unit	7 unit	100 %	Kategori Baik. Penyebab: Situasi ekonomi pasca covid telah membaik, Perangkat daerah memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya beli dengan mempromosikan produk unggulan, pendampingan pelaku ekspor untuk meningkatkan kualitas produk. Perangkat daerah aktif memfasilitasi munculnya produk unggulan.	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah Meningkatkan kualitas barang dan peluang ekspor Meningkatkan fasilitasi promosi produk unggulan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	11 sentra	14 sentra	127.72 %	Kategori Baik Penyebab Meningkatnya aktivitas ekonomi sektor industri pengolahan.  Penyebab: Perangkat daerah aktif melaksanakan fasilitasi pendampingan pemberdayaan industri dan pemberdayaan masyarakat. Melaksanakan pelaporan informasi industri dengan baik	Meningkatkan kualitas produk industri kecil  Meningkatkan fasilitasi pembentukan industri kecil
	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85.58	99.51	kategoriBaik Penyebab Meningkatnya tata Kelola pemerintahan	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
	berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi						
7	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	73	72.95	99.93	Kategori Baik Penyebab : Perangkat daerah berupaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan pemantauan pengukuran kinerja, melaksanakan pelaporan kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Meningkatkan mitigasi risiko dan dampak pada kegiatan

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan suatu masalah, harus dicari penyebab permasalahan tersebut kemudian ditetapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun jika tidak ditemui kendala, tetap diperlukan solusi untuk lebih meningkatkan realisasi capaian. Pada tahun 2025 tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan lancar dan realisasi dapat memenuhi sesuai target.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah memerlukan besaran anggaran agar dapat berjalan dengan baik. Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas segala yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pada suatu institusi pada periode tertentu. Tingkat efisiensi anggaran merupakan ukuran suatu keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan bisarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Besaran anggaran pada tiap indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran strategis) Dinas

Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 serta tingkat efisiensi tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tgkt effisien si
	Tujuan 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyon gan	Indeks Pembangu nan Manusia (IPM)	78.19	78.67	100.61	2,261,873,100	2,139,705,214	94.59	107.42
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75	74.81	104.88	2,261,873,100	2,139,705,214	94.59	107.42
		Tingkat Penganggur an Terbuka	3.3	3.26	98.78	2,261,873,100	2,139,705,214	94.59	107.42
	Tujuan 2 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuha n Ekonomi	6.15	5.75	93.50	1.752.392.350	1.623.852.549	92.66	100.90
	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang yang berdaya saing	Jumlah Produk lokal yang berpotensi unggulan	7	7	100	1.168.895.350	1.060.729.950	90.75	110.19
	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembanga n produk IKM	Jumlah sentra industry kecil yang terbentuk	11	14	127.72	583,497,000.0	563,122,599	96.50	132.35
	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85.58	99.51	17,103,209,222	15,622,081,994	91.34	108.94
	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip	73	72.95	99.93	17,103,209,222	15,622,081,994	91.34	109.40

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar dilakukan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Mengurangi pemborosan artinya pada saat penyusunan anggaran, penetapan kebutuhan barang dan jasa hanya untuk barang dan jasa yang benar-benar diperlukan dan sesuai untuk pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah melakukan pengawasan intern dan pemantauan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Proses pengadaan barang jasa merupakan hal penting. Hal ini diawali dari penyusunan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Pada saat ini ditentukan metode pengadaan sehingga diharapkan pelaksanaan berjalan efisien. Yang terpenting adalah proses monitoring dan pengawasan atas penggunaan anggaran.

Proporsi alokasi anggaran pada setiap urusan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama sesuai pada grafik berikut.



**Gambar 3. 3 Grafik Alokasi Anggaran Disdagperinaker 2025**

Anggaran untuk urusan penunjang urusan pemerintahan mendapat jumlah yang lebih besar dibanding urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja. Urusan perdagangan mendapat alokasi anggaran yang paling sedikit. Urusan penunjang urusan pemerintahan termasuk didalamnya untuk gaji dan tunjangan ASN.

#### **7. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 2025**

Upaya pelaksanaan indikator tujuan dan sasaran Disdagperinaker 2025, didukung dengan program dan target capaian yang telah ditetapkan. Analisis keberhasilan program dan kegiatan tertera pada tabel berikut.

Tabel 3. 11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100.61				menunjang
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	100.28				menunjang
		Tingkat Pengangguran Terbuka	104.6	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Rencana Tenaga kerja Makro	1 dokumen	menunjang
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih	71	menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan berdasar unit kompetensi	100%	menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	80.5%	menunjang
				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan anatar kerja	100%	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					di daerah kab/kota		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			menunjang
				Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100%	menunjang
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	menunjang
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	100%	menunjang
	Tujuan 2 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	93.50				menunjang
2	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah Produk lokal yang berpotensi unggulan	100	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	50%	menunjang
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	100%	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%	menunjang
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga	16%	menunjang
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya keg untuk Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	menunjang
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	menunjang
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	menunjang
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat timbang yang ditera ulang	88 %	menunjang
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	Terlaksananya metrology legal berupa	100%	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Ulang, dan Pengawasan	tera, tera ulang		
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang telah difasilitasi dalam kemitraan pameran	100 produk	menunjang
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	menunjang
3	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industry kecil yang terbentuk	127.72	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	42%	menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	menunjang
				Program Pengendalian ijin usaha industri	Jumlah perijinan Perusahaan yang dipantau	100%	menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	100%	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kabupaten/Kota	Kewenangan		
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah industri yang melaporkan pada aplikasi SIINas		menunjang
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	menunjang
	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	99.51			86	menunjang
4	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip	99.93	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	72.95	menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya keg Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya keg Administrasi	100%	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	menunjang

Capaian indikator tujuan dan sasaran Disdagperinaker 2025 didukung oleh berjalannya program kegiatan secara efektif. Indikator Indek Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka didukung oleh berjalannya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Aktivitas yang dilakukan selalu dipantau dan dimonitoring agar mencapai output yang direncanakan. Aktivitas yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Pelayanan antar Kerja., Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan didukung oleh Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program tersebut didukung aktivitas Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Indikator jumlah sentra industri kecil yang dibentuk didukung oleh Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan program Pengendalian Ijin Usaha Industri. Aktivitas yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dan Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian indikator adalah administrasi keuangan, kepegawaian dan perencanaan.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung program di Disdagperinaker tahun 2025 tercantum pada gambar di berikut.



**Gambar 3. 4 Pelatihan Berbasis Kompetensi Design Grafis**



**Gambar 3. 5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Barista (Meracik Kopi)**



**Gambar 3. 6 Pemantauan Harga di Pasar terkait Pengendalian Inflasi**



**Gambar 3. 7 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelinting dan Blending Sigaret Kretek Tangan 2025**



**Gambar 3. 8 Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota**

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2025 tercantum pada tabel berikut:

#### Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>			
	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.	44.704.950	42.999.950	96
	Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga	0	0	0
2	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			
	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.862.445.000	1.756.860.607	94
	<i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta sarana dan Prasarana Lemba Pelatihan Kerja</i>	100.000.000	97.532.925	97,5
	<i>Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	9.975.000	9.975.000	100
	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	8.500.000	7.787.500	91,6
	<i>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</i>			
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi.	0	0	0
	<i>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>			
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.			
	<i>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.			
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			
	<b><i>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja.	0	0	0
	Pelayanan antar Kerja.	0	0	0
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	0	0	0
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	5.000.000	5.000.000	100
	Perluasan Kesempatan Kerja	13.356.000	11.918.500	89,2
	<b><i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i></b>			
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	7.997.400	7.497.400	93,7
	<i>Job Fair/Bursa Kerja</i>	34.800.000	34.800.000	100
	<b><i>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).	0	0	0
<b>4</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			
	<b><i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	29.999.850	27.553.932	91,8
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	0	0	0
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	112.374.900	105.559.400	93,9
	<b><i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	32.720.000	32.220.000	98,5

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.			
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	0	0	0
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh serta Non Afiliasi	0	0	0
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.	32.720.000	32.330.000	98,8
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	0	0	0
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			
	<b><i>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i></b>			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0
	<b><i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i></b>			
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0	0	0
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
	<b><i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i></b>			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	420.398.000	314.940.000	74,9
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	500.804.550	500.803.950	100
	<b><i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i></b>			

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	<b><i>Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i></b>			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000	24.830.000	99,3
<b>7</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			
	<b><i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i></b>			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.474.800	15.415.600	99,6
	<b><i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.716.000	2.704.800	99,6
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			
	<b><i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
	Pameran Dagang Lokal	0	0	0
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0	0	0
<b>9</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			
	<b><i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i></b>			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	16.776.000	16.767.500	99,6
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			
	<b><i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i></b>			

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	185.010.000	182.563.300	98,7
<b>11</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.	37.010.750	36.510.400	98,7
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	37.668.800	36.840.000	97,8
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8.754.750	8.495.250	97
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8.291.700	8.290.500	99
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	422.311.800	407.263.400	96,4
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>			
	<b>Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	28.275.400	25.425.700	89,9
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	1.808.800	1.742.500	96,3
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI</b>			

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	<b>NASIONAL</b>			
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	34.000.000	33.778.349	99,3
	Diserminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/kota melalui SIINas	0	0	0
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5.375.000	4.776.500	88,9
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	27.600.000	27.088.000	98,1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.422.284.222	8.102.841.155	87,1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	10.882.100	10.882.100	100
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1.141.200	1.141.200	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	350.486.700	347.750.000	99,2
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134.450.000	130.825.000	97,3
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.127.000	17.127.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.744.600	53.857.000	93,3
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	335.759.100	325.254.300	96,9
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	113.526.300	111.789.000	98,5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.970.000	29.730.400	99,2
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.025.000	7.025.000	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengadaan Mebel	116.200.000	112.959.150	97,2
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.930.000	139.189.900	98,8
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.696.908.000	1.613.700.000	95,1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.800.000	44.800.000	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.350.000	338.106.037	98,5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.769.701.600	3.762.633.452	99,8
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.722.100	189.455.000	85,1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.739.000	32.545.000	99,4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.862.000	223.382.400	98,0
	<b>Total</b>	<b>21.117.474.672</b>	<b>19.385.639.757</b>	

Total anggaran Disdagperinaker Tahun 2025 untuk semua program yang mendukung tujuan dan sasaran strategis adalah Rp 21.117.474.672, - (Dua puluh satu milyar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Searapan anggaran sebesar Rp 19.385.639.757,- ( Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah ) atau sebesar 91.79 %. Efisiensi anggaran sebesar Rp.1.731.834.915,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), atau sebesar 8.21 %.

### **3.3 Inovasi**

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai inovasi berupa aplikasi SODAGAR. Inovasi ini merupakan bentuk aplikasi Sistem Online Perdagangan Kabupaten Karanganyar. Dalam Aplikasi tersebut memuat informasi mengenai harga terkini bahan pokok dan barang penting, data ekspor, layanan rekomendasi toko modern, layanan rekomendasi ijin usaha distributor pupuk bersubsidi, dan rekomendasi tanda daftar Gudang

### **3.4 Penghargaan**

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja memperoleh penghargaan berupa Penghargaan Terbaik Kedua kategori Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Terbaik. Penyelenggara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diberikan kepada LPK Widi Prakarsa Training Consulting.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri atas 8 (delapan) indikator sebagai berikut.

1. Capaian kinerja lebih dari 100% atau kategori Istimewa terdapat 4 (empat) indikator sasaran, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan jumlah sentra industri kecil yang dibentuk
2. Capaian kinerja 85-100% atau kategori baik terdapat 4 (empat) indikator meliputi indikator Pertumbuhan ekonomi, Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sakip OPD

#### **4.2 Rekomendasi**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar selalu direview oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan hasil review, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut

- a. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- b. Menyusun pedoman pemantauan mengenai perkembangan atau kemajuan pencapaian kinerja OPD
- c. Memberikan edukasi kepada setiap pegawai untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada Masyarakat dan Pemerintah kabupaten Karanganyar, bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan Gambaran tentang Tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui Tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar melalui pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karanganyar, Februari 2026

Pt. Kepala Dinas Perdagangan,  
Perindustrian, dan Tenaga Kerja



**Nugroho, S.Sos., M.Hum**  
Pemimpin Utama Muda (IV c)  
NIP. 19680705 199001 1 001